

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. *There is no (economic) growth without investment*, demikian biasa dikemukakan. Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan? karena dari investasi dapat dilihat pengaruh bagi pertumbuhan dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja, dan efeknya terhadap pembentukan capital dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan.<sup>1</sup> Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Selain investasi dari dalam negeri, masuknya investasi asing menjadi harapan baru dalam proses pembangunan sebuah negara, terutama untuk negara-negara berkembang yang biasanya memiliki keterbatasan dalam peningkatan pembangunan, diantaranya keterbatasan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga salah satu upaya untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya. Kemampuan untuk menyiapkan lahan investasi, mengelola investasi, memberi jaminan keberlangsungan dan manfaat investasi pada setiap jenis investasi yang telah diinvestasikan oleh pihak asing lain menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* sehingga menambah ketertarikan pihak investor asing untuk berinvestasi secara terus menerus di wilayah tersebut. Investasi asing sebagai sebuah elemen yang penting bagi perbaikan ekonomi

---

<sup>1</sup> Hamid, E.S., 2006, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta, hal 165

dan merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi selain itu investasi yang dilakukan secara tepat akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.<sup>2</sup> Harapannya dengan adanya otonomi daerah, kegiatan investasi bisa direspon positif, cepat dan baik oleh pemerintah daerah.

Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri meliputi kerja sama kabupaten/kota kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan investasi tentu saja akan memberikan efek positif bagi daerah tersebut, yang berarti memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Melalui otonomi, daerah akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam mempromosikan potensi daerahnya dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pihak swasta. Untuk dukungan tersebut pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung investasi yang akan saling menguntungkan bagi investor, pemerintah daerah dan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Osborne, D. dan Platrik, P, 2000, *Memangkas Birokrasi*, PPM, Jakarta

Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat perdagangan, karena menjadi simpul pergerakan antar wilayah seperti: DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil-hasil pertanian, pedesaan dan pemasaran barang-barang produksi perkotaan maupun regional dikumpulkan di Kota Cirebon. Tersedianya alat transportasi dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu pusat koleksi distribusi barang, jasa, dan orang di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cirebon direncanakan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan merupakan pusat pelayanan berskala regional pada wilayah pengembangan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Sebagaimana telah disebutkan diatas, Kota Cirebon menjadi pusat pengumpul barang hasil produksi dan menjadi pusat pelayanan/jasa untuk wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Potensi wisata alam Kabupaten Kuningan, potensi minyak Balongan dan pertanian Kabupaten Indramayu, potensi rotan Kabupaten Cirebon, menjadikan Kota Cirebon sebagai kota bisnis yang menjadi tempat berkumpulnya investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alam sehingga struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon diperkirakan selama periode tahun 2005 s/d 2025 berkisar antara 5% s/d 7%.<sup>3</sup> Data BPMPT nilai investasi di Kota Cirebon terus meningkat namun didominasi oleh PMDN, sedangkan untuk PMA nya masih sangat minim.

Posisi strategis kawasan, peluang investasi dan adanya peluang pasar komoditas unggulan serta adanya otonomi daerah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan

---

<sup>3</sup> [www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2014/08/BAB-II.pdf](http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2014/08/BAB-II.pdf) di akses tanggal 30 Maret 2016

wilayah Kota Cirebon untuk kemajuan pembangunan daerah. Susilo dalam artikelnya *Observasi di Kota Cirebon (2011)* menyatakan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi besar meliputi: (1) Kota transit yang terletak di jalur Pantura dapat dicapai dengan sangat mudah dengan segala model transportasi, (2) Kota dengan julukan kota peninggalan Wali Sanga yang memiliki peninggalan warisan situs budaya Keraton Kesepuhan, Kanoman dan Kacirebonan, (3) Kota dengan budaya yang majemuk karena dibangun di atas berbagai percampuran suku bangsa, memiliki kesenian yang beraneka ragam, (4) Memiliki benda-benda peninggalan budaya yang bermakna tinggi, (5) Memiliki berbagai macam kuliner yang lezat, (6) Masyarakat yang memiliki sikap terbuka dan selalu berkembang maju, (7) Memiliki potensi corak batik yang unik seperti corak karangan dan mega mendung.

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian di Kota Cirebon dibutuhkan peran investasi yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah harus menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cirebon diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Cirebon. Adapun visi Kota Cirebon 20 (dua puluh)

tahun ke depan adalah “*Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Sejahtera*”.<sup>4</sup>

Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing.<sup>5</sup>

Dalam konteks ekonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah realitas investasi di era otonomi ini khususnya di Kota Cirebon?

## **B. Tujuan Penulisan**

1. Tesis ini bertujuan untuk membuka wawasan mengenai investasi, terkait pelaksanaannya, strategi, arah kebijakan, sejarah perkembangan, dan pentingnya bagi pembangunan daerah.
2. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan investasi asing di Kota Cirebon, terkait dengan perkembangannya dan faktor penyebab minimnya investasi asing di kota Cirebon.
3. Tesis ini juga sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar S-2 pada program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025

<sup>5</sup> Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta

### **C. Kontribusi Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, gambaran dan tambahan informasi bagi para peminat maupun penulis lain, serta para mahasiswa ilmu Hubungan Internasional maupun mahasiswa lainnya yang hendak melaksanakan penelitian tentang investasi di Kota Cirebon.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di bidang pembangunan perekonomian dan pengembangan wilayah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu: *Mengapa investasi asing di Kota Cirebon belum optimal?*

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan pencarian tentang penelitian atau riset atau buku dengan tema terkait yang kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian

Richard Seymour (*University of Otago*) & Sarah Turner (*McGill University*) dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002): 33-51 menuliskan *Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment*<sup>6</sup> yang berisi terkait pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan bagi daerah-daerah di Indonesia untuk berkembang, dengan beragam permasalahan yang timbul namun dengan otonomi itu memberikan kesempatan bagi masing-masing daerah untuk dapat membangun daerahnya.

---

<sup>6</sup> <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Seymour-Turner.pdf> diakses pada 18 Maret 2016

Dalam *Good Governance, Daya Saing dan Investasi Global*, Jurnal ISIP Volume 6, Nomor 3, Maret 2003 (309-328) yang ditulis oleh Zaenal Soedjais tahun 2003, menerangkan bahwa Investasi Global menjadi hal sangat penting dan tantangan bagi pemerintah untuk membangun kebijakan-kebijakan baru untuk penciptaan iklim profesionalisme khususnya berkenaan dengan pengembangan otonomi daerah.

Kemudian dalam judul *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat* di Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 2 SAPPK V3N3| 663 yang ditulis oleh Nisa Shifa Rahima, Heru Purboyo, Hidayat Putro juga menjelaskan tentang Pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan.

Dari beberapa literature di atas, penulis melihat banyak sekali keragaman yang mendukung dalam penyusunan tesis ini. Penulis sendiri sepakat dengan pernyataan beberapa literatur di atas bahwa adanya interkonektivitas antara otonomi daerah, kebijakan, dan perkembangan investasi. Namun disalahnya satu literature di atas juga penulis menilai bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan investasi tidak hanya misal dari faktor infrastruktur saja, oleh sebab itu perlu penulisan yang lebih detail tentang variabel yang mempengaruhi perkembangan investasi di suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater yang membahas tentang investasi asing di Tiongkok, mereka menyatakan bahwa sasaran utama yang mendasari kebijakan Tiongkok untuk membuka diri dengan dunia luar dan membolehkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing untuk mengimpor teknologi maju dan keahlian managerial serta menarik dana-dana asing. Dalam

melakukan hal ini RRT dapat mengembangkan kualitas produk mereka sendiri, meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat modernisasi.<sup>7</sup>

Menurut Pheni Chalid, penerapan otonomi daerah dewasa ini memberikan prospek yang menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, dimana keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berarti, *pertama*, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan penduduk; *kedua*, mendorong peningkatan pendapatan pada sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Ukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan pemanfaatan sumberdaya di daerah yang dilakukan lebih optimal sehingga memotivasi proses pertukaran produksi lintas daerah maupun lintas sektor.<sup>8</sup> Oleh karena itu investasi asing menjadi isu penting bagi daerah-daerah pasca penerapan otonomi daerah di Indonesia, daerah berkompetisi untuk menggunakan segala potensi sebagai bagian dari proses untuk menarik investasi asing ke daerahnya.

Sedangkan Takdir Ali Mukti, dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia (2013)*, mengatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua actor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan internasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama “kedaulatan” suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan

---

<sup>7</sup> D.Fischer dan M.Stater, *Direct Investment In The RRT*, dalam A.J Rood an R.W Jagtenberg, *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia*. Volume I, 1995, Hal. 53 dalam Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

<sup>8</sup> Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan Partnership, Jakarta, hal 108-109



“*share*” kedaulatan dalam batas-batas konstitusionalnya.<sup>9</sup> Inilah geliat lokal dalam ranah global yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing menuju era globalisasi yang penuh persaingan, tidak hanya negara tapi juga wilayah setingkat provinsi atau daerah setingkat kabupaten/kota di dalam negara tersebut.

Dari beberapa tulisan dan pendapat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki wewenang lebih dari sebelumnya salahsatunya untuk dapat membuka kerjasama internasional dalam upaya untuk meningkatkan investasi asing. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bertindak atas nama sendiri akan tetapi membawa nama pemerintah pusat untuk itu negara sama sekali tidak akan kehilangan kedaulatannya.

Dan kemudian penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai investasi asing di Kota Cirebon. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian atau tulisan yang secara khusus membahas tentang tema tersebut belum ada, namun ada beberapa artikel dan referensi tulisan mengenai potensi, investasi asing dan otonomi daerah di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dan dari beberapa artikel dan tulisan atau karya ilmiah tersebut digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

## **F. Kerangka Teoritik**

Teori berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta, hal186

## 1. Investasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Investasi asing juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi.<sup>11</sup>

Menurut Alan M. Rugman ada dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antarlain tenaga kerja, modal, teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Sedangkan yang disebut sebagai variabel non-ekonomi adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sadono Sukirna, 2000, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta

<sup>12</sup> G.Katosapoetro, 1985, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, hal 25

Sjohlm juga menguatkan pendapat tersebut, dengan menyatakan bahwa faktor stabilitas politik dan keamanan suatu negara yang paling dipertimbangkan oleh investor asing sebagai keinginan untuk melakukan investasi di wilayah tersebut, teori ini kembali diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah pada tahun 2003 yaitu dengan menyatakan faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktifitas serta infrastruktur fisik merupakan beberapa indikator yang paling berpengaruh terhadap daya tarik investor asing untuk melakukan investasi asing di Indonesia.<sup>13</sup>

Keberadaan investasi asing juga memberi manfaat bagi wilayah yang dijadikan tempat berinvestasi. Manfaat tersebut adalah adanya perlindungan politik dan keamanan wilayah, karena bila investor berasal dari negara dengan tingkat pertahanan, keamanan dan militer yang kuat maka bantuan keamanan juga akan diberikan oleh negara tersebut.<sup>14</sup>

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Alam M. Rugman, Kota Cirebon telah memenuhi dua variabel penting yang mempengaruhi datangnya investor asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Kota Cirebon mempunyai keunggulan spesifik atau faktor lokasi yang sangat strategis. Sedangkan jika dilihat dari unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah, Kota Cirebon pun telah memenuhi kriteria tersebut, dimana sumber daya alam dan sumber daya manusia nya tersedia. Kota Cirebon merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk pengembangan dunia usaha baik yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, perhotelan, pariwisata dan industri lainnya serta merupakan daerah otonom yang mempunyai banyak keunggulan serta potensi dan

---

<sup>13</sup> Sri Muwarni, 2007, *Analisa Kebijakan Moneter Kaitannnya Dengan Penanaman Modal Asing* Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>14</sup> Gunarto Suhardi, 2004, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal 45

beberapa faktor *economic oportunity* yang mungkin dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditemukan adanya hubungan yang sangat menguntungkan oleh kedua belah pihak antara investor dengan daerah yang dijadikan tempat investasi, sehingga peningkatan investasi asing di daerah selayaknya patut dikembangkan.

## **2. Otonomi Daerah**

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, *outonomos/autonomia*, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*).<sup>15</sup> *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Ada beberapa pengertian otonomi daerah, diantaranya adalah<sup>16</sup>

- a) Otonomi daerah adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b) Otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*).

---

<sup>15</sup> Hugo F. dalam Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Bigraf, Yogyakarta, hal 1

<sup>16</sup> Sidik Jatmika. *Op.Cit*

- c) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- d) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, mengetahui kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*).
- e) Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/donasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Otonomi daerah menurut Vincent Lemius memiliki makna kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setidaknya terdapat tiga unsur yang terkait dalam otonomi daerah, yaitu<sup>17</sup>

- a) Adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya.
- b) Kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional.

---

<sup>17</sup> Sidik Jatmika. *Op.Cit.*

- c) Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

### 3. Kebijakan Publik

Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip yang dimaksudkan sebagai garis pedoman untuk usaha mencapai sasaran, garis haluan.

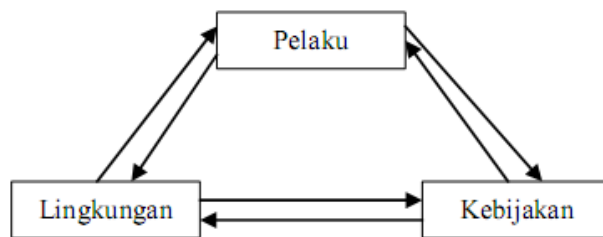
Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choses to do or not to do*). Apabila pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu, artinya pemerintah harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah. Bukan karena keinginan pemerintah atau pejabatnya saja. Di sisi lain sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah nilai pula sebagai kebijakan karena pengaruhnya sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. William Dunn mengatakan bahwa sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisah di dalam prakteknya<sup>18</sup>

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Jika kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye terdapat tiga elemen kebijakan pembentuk sebuah system yaitu *public*

---

<sup>18</sup> William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 111

*policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*. Ketiga elemen tersebut saling mempengaruhi, sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri<sup>19</sup>.



Jika dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Andrew Lee dan Maurice Sunkin (2003) menjelaskan bahwa undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik, kebijakan tanpa undang-undang tidak memiliki kekuasaan untuk diimplementasikan.<sup>20</sup>

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang mengikat bagi banyak orang, yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik yang dalam hal ini adalah penerima mandat dari publik atau orang banyak yang secara umum dipilih melalui proses pemilihan atau yang bertindak atas nama rakyat. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik negara maju adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan

---

<sup>19</sup> William N Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hal 111

<sup>20</sup> Andrew Lee Suer, Maurice Sunkin, 2003, dalam Riant Nugroho, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 74

segala hal yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan banyak orang menuju ke arah yang lebih baik.

Kebijakan dipandang sebagai sebuah proses yang tertuju pada siklus kebijakan meliputi: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.<sup>21</sup> Sebuah kebijakan ketika sudah dirumuskan tidak dengan sendirinya terimplementasikan, namun perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada implementasinya.

Guna membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini digunakan paradigm post-positivis sebagai alat bantu, dimana paradigm post-positivis memandang kebijakan publik sebagai proses dinamik dan kompleks. Di Indonesia akan banyak sekali pihak yang bertarung di arena kebijakan secara terbuka, melakukan bargaining dan tarik menarik kepentingan. Sehingga perubahan kebijakan pun akan dapat terjadi kapan saja dengan cara apa saja.<sup>22</sup>

#### **4. Virtual Diplomacy**

Dengan laju kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat revolusioner dewasa ini secara mendasar telah dan akan terus merubah perilaku hubungan antar manusia, baik di dalam negerinya sendiri maupun dengan pihak luar negeri. Olessya M Grech menengarai akan adanya dalam perubahan perilaku hubungan antar negara, khususnya dalam hubungan diplomatic, dari aktivitas diplomasi yang

---

<sup>21</sup> Nakamura & Smallwood, 1980:31 ; Parson, 1977:543, dikutip dari Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, 2000, hal 78

<sup>22</sup> Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*, 2000, hal 7-8



bersifat interaksi riil dalam dimensi ruang, waktu dan tempat, menjadi aktivitas diplomasi yang bersifat realitas imajinatif, atau *Virtual Diplomacy*<sup>23</sup>

*Virtual Diplomacy* dicirikan dengan beberapa karakteristik antarlain, pertama yaitu penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) yang sangat dominan sehingga menggeser peran manusia secara fisik untuk berhubungan dalam aktivitas diplomasi. Kedua yaitu terjadi pergeseran actor diplomasi yakni dari diplomat profesional menjadi admin atau personalia pengolah data. Ketiga yaitu aktivitas diplomasi tidak lagi berpusat di pusat pemerintahan tetapi aktivitas virtual diplomacy muncul secara sporadic dari segenap penjuru antar bangsa dengan bahasa internasional di pelosok-pelosok negara sekalipun. Disinilah actor diplomacy virtual tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh negara.

## **G. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka penulis membuat hipotesa yaitu belum optimalnya investasi asing di Kota Cirebon dikarenakan belum maksimalnya

1. Kualitas pelayanan publik
2. Promosi investasi
3. Kebijakan pendukung kegiatan investasi asing

---

<sup>23</sup> Grech, Olesya M. "Virtual Diplomacy, Diplomacy of The Digital Age" hal.20-24, University of Malta, 2006. Dalam bukunya Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, hal.177

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

(1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, yang diperoleh melalui :

a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya di:

1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT)

Kota Cirebon

Beralamat di Jalan Kebumen No.2 Kota Cirebon

Signifikansi dengan BPMPT yaitu terkait dengan kegiatan investasi di Kota Cirebon

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon

Beralamat di Jalan Brigjen Darsono No.1 Kota Cirebon

Signifikansi dengan Bappeda yaitu terkait dengan perumusan perencanaan pembangunan Kota Cirebon

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon

Beralamat di Jalan Siliwangi No.109 Kota Cirebon

Signifikansi dengan DPRD yaitu terkait dengan perumusan kebijakan-kebijakan di Kota Cirebon

- 4) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon  
Beralamat di Jalan Sekar Kemuning I Kota Cirebon  
Signifikansi dengan BPS yaitu terkait dengan data statistik dan pendukung lainnya terkait dengan Kota Cirebon dan kegiatan investasinya
  - 5) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Kota Cirebon  
Beralamat di Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon  
Signifikansi dengan Bapusipda yaitu terkait dengan data pendukung tentang Kota Cirebon berupa arsip-arsip yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Cirebon
  - 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Beralamat di Jalan Sasana Budaya No.184 Kota Cirebon  
Signifikansi dengan Kesbangpol yaitu terkait dengan perijinan dalam rangka penelitian di Kota Cirebon
- b. Interview atau wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya dengan:
- 1) Bapak Icip Suryadi, S.Sos, MM  
Jabatan: Kasubid Promosi dan Potensi Daerah BPMPT Kota Cirebon  
Wawancara dengan beliau dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Cirebon

2) Ibu Yuni Puspita, SE, MT

Jabatan: Pulahta Pengembangan Dunia Usaha Bidang Ekonomi  
Bappeda Kota Cirebon

Wawancara dengan beliau dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dan jelas tentang perencanaan pembangunan di Kota Cirebon

3) Bapak H.Budi Gunawan

Jabatan: Komisi B DPRD Kota Cirebon dan Pengusaha

Wawancara dengan beliau dilakukan untuk mengetahui lebih dalam dan jelas tentang perumusan kebijakan investasi di Kota Cirebon

(2) Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, Perda, Perwali, dan lainnya diperoleh melalui:

- a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
- b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yaitu diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan berupa catatan, transkrip, dan lembaran laporan daerah.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Whintney (1960)<sup>24</sup>, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

### 3. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa kualitatif. Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nazir, moh. 2005. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.

<sup>25</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

#### 4. Lokasi

Sesuai dengan bahasan penulisan maka penelitian dilakukan di Kota Cirebon melalui beberapa instansi pemerintah terkait diantaranya Bappeda, BPMPT, BPS, DPRD dan Bapusipda.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab,yaitu :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas mengenai relevansi investasi bagi pembangunan di Kota Cirebon

**BAB III** Membahas mengenai dinamika investasi, otonomi daerah dan kebijakan investasi

**BAB IV** Membahas mengenai faktor penyebab masih belum optimalnya investasi asing di Kota Cirebon

**BAB V** Merupakan kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya